

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Suatu proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja dan kestabilan harga.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya serta kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja yang dibarengi dengan penambahan sumber pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia memiliki angkatan kerja yang sangat besar. Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Secara umum pasar kerja Indonesia dicirikan oleh kelebihan penawaran tenaga kerja yang sangat tinggi dan kualitas tenaga kerja yang masih rendah sehingga menyebabkan kenaikan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap ke lapangan pekerjaan, dengan kata lain pengangguran naik.

Indonesia saat ini berada dalam tahap pembangunan dengan memiliki penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang dependen dan lansia. Untuk mengoptimalkan keadaan ini, sangatlah penting bagi Pemerintah untuk memperluas investasi dibidang pendidikan dan

pelatihan keterampilan, khususnya karena pekerja berpendidikan tinggi dapat memiliki upah lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik.

Berikut ini disajikan data tentang angka pengangguran di Indonesia periode tahun 2003 – 2013 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Pengangguran, Tingkat Inflasi,
Dan Persentase Pertumbuhan Tingkat Upah
Pada Periode 10 Tahun
Tahun 2003 – 2013

Tahun	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	Tingkat Inflasi (dalam persen)	Tingkat Upah (dalam ribuan rupiah)
2003	9,67	5,06	414,7
2004	9,86	6,40	458,5
2005	11,24	17,11	507,7
2006	10,28	6,60	602,2
2007	9,11	6,59	667,9
2008	8,39	11,06	743,2
2009	7,87	2,78	830,7
2010	7,14	6,96	908,8
2011	6,56	3,79	1119,1
2012	6,14	4,30	1332,4
2013	6,25	8,38	1595,9

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, hingga mencapai titik rendah yaitu 6,14 persen pada tahun 2012 dan ini merupakan tingkat pengangguran terendah yang dicapai di Indonesia selama satu dekade terakhir. Namun, krisis yang terjadi baru-baru ini dan dengan kenaikan upah minimum membuat tingkat pengangguran meningkat hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005. Penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang terjadi pada tahun 2005 yaitu sebagai dampak kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 maupun awal Oktober 2005, terutama di sektor industri padat karya dan usaha-usaha kecil yang menggunakan BBM sebagai penunjang kegiatan utamanya.

Berdasarkan data BPS dalam tabel 1.1 menyatakan, angka pengangguran di Indonesia per tahun 2013 melonjak 6,25 persen atau sebanyak 7,39 juta jiwa dari tahun 2012 sebanyak 7,24 juta jiwa.¹ Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan bahwa tahun 2013 adalah tahun dengan gejolak ekonomi global yang memberikan tekanan cukup serius untuk domestik. Sehingga pemerintah terpaksa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada ketersediaan tenaga kerja.²

Penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih kecil dibanding pertambahan angkatan kerja baru, diduga juga menyebabkan terjadi penambahan jumlah penganggur baru. Dengan penambahan ini seharusnya juga didukung oleh

¹ Tahun 2013, Pengangguran di Indonesia Melonjak
(<http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/07/tahun-2013-pengangguran-di-indonesia-melonjak-605967.html>)

² Ekonomi RI Tumbuh 5,7% di 2013, Tapi Pengangguran Belum Bisa Diatasi
(<http://finance.detik.com/read/2014/02/05/191226/2488489/4/ekonomi-ri-tumbuh-57-di-2013-tapi-pengangguran-belum-bisa-diatasi>)

penambahan investasi baru dan peningkatan kapasitas produksi pada sektor-sektor yang kurang menampung banyak tenaga kerja. Untuk menekan angka pengangguran ke depan, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan dengan orientasi pada penciptaan lapangan kerja yang luas.

Tingkat pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dimana perekonomian Indonesia telah mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu tingkat pertumbuhan PDB berada antara 5 dan 6 persen selama periode terakhir. Pada tahun 2012 pengangguran diperkirakan mencapai 4,30 persen, ini merupakan tingkat pengangguran terendah dicapai di Indonesia selama dekade terakhir. Namun, penurunan terbaru dalam indikator ekonomi telah melihat adanya peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005.

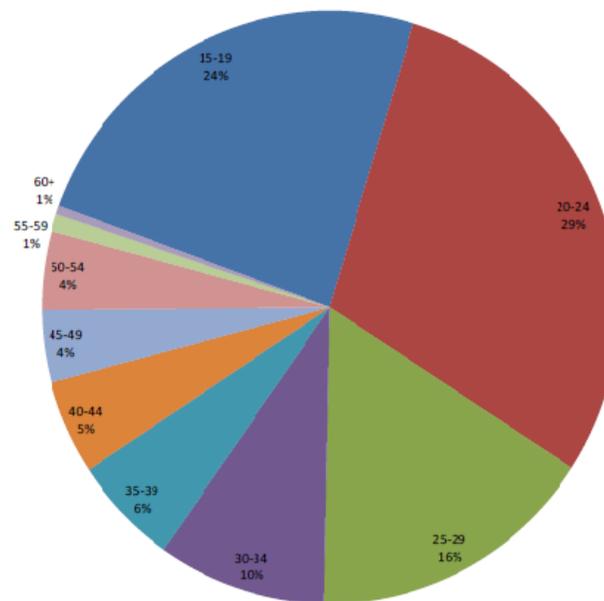
Pengangguran tertinggi terlihat di kalangan lulusan SMA dan SMK. Mereka umumnya berusia antara 15 sampai 25 tahun dan belum punya pengalaman kerja. Secara umum, sebagian besar pekerja yang menganggur di Indonesia sedang mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil yang sudah merasa putus asa dan enggan mencari pekerjaan atau sedang mempertimbangkan upaya untuk membuka usaha sendiri atau menunggu dibukanya lowongan kerja baru.

Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam keterlibatan pasar kerja bagi pengangguran. Lebih lanjut dijelaskan, sebagian besar pencari kerja yang menganggur telah lulus SMA sebagai tingkat pendidikan tertinggi mereka,

sementara sebagian besar pekerja menganggur yang kehilangan semangat memiliki tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenuhi kriteria perekrutan perusahaan, sementara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak memenuhi tuntutan dengan mudah, dan oleh karena itu pekerja ini memiliki risiko kehilangan semangat lebih tinggi.

Gambar 1.1

Keadaan Pengangguran Menurut Usia di Indonesia Tahun 2013



Sumber : BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Februari 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Ditinjau dari sudut perekonomian, pengangguran menimbulkan masyarakat yang tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Ketidakdapatkan masyarakat dalam memaksimalkan

tingkat kesejahteraannya menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu dampak dari adanya masalah pengangguran dapat pula mengganggu serta menurunkan taraf kesehatan dan pendidikan keluarganya. Sehingga pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur beserta keluarganya.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran sebagai akibat dari kekurangan permintaan agregat disebabkan oleh aliran investasi yang rendah, suku bunga yang tinggi, ketimpangan neraca pembayaran, dan tingginya tingkat inflasi.³ Namun yang menjadi sumber utama dalam permasalahan kurangnya permintaan agregat adalah tingginya tingkat inflasi. Dengan kenaikan tingkat inflasi tersebut, akan membawa kecenderungan terhadap penurunan taraf kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat persentase tingkat inflasi Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17,11% yang diikuti dengan penambahan tingkat pengangguran yaitu sebesar 11,24% kemudian tinggi kembali pada tahun 2008 yaitu sebesar 11,06 dan inflasi terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,78. Dan kembali tinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38%.

³ Sadono Sukirno, *Op.cit.*, p. 13-16

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, bahwa harapan pemerintah untuk menekan inflasi sepanjang 2013 tidak berhasil, pada awalnya pemerintah menargetkan inflasi 2013 sebesar 5,8 persen, namun karena gejolak ekonomi global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia, angka tersebut direvisi menjadi 7,2 persen. Angka itu pun tidak dapat dicapai pemerintah. Kepala BPS, Suryamin mengatakan, sejak Maret 2013 inflasi terus terjadi karena harga berbagai komoditas naik menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni. Kenaikan harga tidak terkendali terutama terjadi hingga September 2013.⁴

Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi rendah yaitu mencapai di bawah 2 sampai 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 4 sampai 10 persen.⁵

Dalam jangka pendek tingginya tingkat inflasi merupakan permasalahan yang akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Jika tidak rakyat tidak mampu lagi membeli barang-barang yang di produksi. Tetapi inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh

⁴BPS: Inflasi, Kemiskinan Meningkat pada 2013 (<http://www.voaindonesia.com/content/bps-inflasi-kemiskinan-meningkat-pada-2013/1822602.html>)

⁵Sadono Sukirno, *Ibid.*, p. 14

inflasi. Jika seperti itu maka banyak barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli sehingga banyak pula perusahaan yang akan berkurang keuntungannya. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka perusahaan akan berusaha menekan biaya sebagai konsekuensi atas berkurangnya keuntungan. Hal inilah yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja atau buruhnya dengan mem-PHK para pekerjanya.

Dalam jangka panjang apabila inflasi tidak dapat dikendalikan akan menjadi semakin memburuk. Untuk inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor.⁶ Kemungkinan hal terburuknya adalah tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan tidak dapat teratasi karena tidak ada lagi investor yang menanamkan investasinya di Indonesia. Pada masa inflasi tinggi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli rumah dan tanah, serta menanamkan modalnya ke dalam portofolio dianggap akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.

Keputusan pemilik modal tersebut dilatar belakangi oleh tingkat bunga yang meningkat saat terjadinya inflasi. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk mengembangkan sektor-sektor produktif (sektor riil) dalam melakukan penyerapan tenaga kerja. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang-barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. Maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan

⁶Sadono Sukirno, *Ibid.*, p. 15

impor berkembang lebih cepat. Tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu aliran modal keluar akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri, maka lebih banyak pengangguran dan defisit neraca pembayaran akan berlaku.

Alasan lain adanya pengangguran adalah upah. Setiap tahun, penentuan upah minimum selalu menjadi bahasan utama di antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Tahun 2013 ini, dikejutkan dengan penetapan kenaikan upah yang sangat signifikan di sejumlah wilayah. Untuk menetapkan upah minimum provinsi, masing-masing Dewan Pengupahan Provinsi, yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta penasihat dari akademisi, melakukan survei untuk menentukan upah yang diperlukan untuk mendapatkan “standar minimum hidup layak” atau “kebutuhan hidup layak “(KHL). Gubernur masing-masing provinsi menetapkan upah minimum provinsi, setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat Provinsi. Idealnya, upah minimum harus setara dengan KHL.

Terlepas dari hal ini, kesenjangan antara KHL dan upah minimum dari waktu ke waktu telah muncul. Upah minimum provinsi 2013 secara nasional naik rata-rata 18,9% (19,1%) dari tahun sebelumnya dan merupakan kenaikan yang cukup tinggi sejak krisis ekonomi 1997. Kenaikan UMP ini terutama didominasi oleh kenaikan di beberapa provinsi basis industri seperti Jakarta, Riau Kepulauan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Maluku dan Bengkulu yang kenaikannya di atas 20%.

Kenaikan upah minimum yang fanstatis ini di sebabkan oleh penetapan upah minimum selama ini (2009 – 2012) dilandasi keputusan nilai tengah antara usulan upah minimum buruh dan pengusaha, sehingga nilai upah minimum yang ditetapkan tidak pernah mencapai 100% KHL. Selain itu juga disebabkan oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).⁷

Data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dari 941 perusahaan yang meminta penangguhan upah minimum 2013, hanya 498 yang disetujui oleh dinas tenaga kerja di daerah. Adapun jumlah buruh yang terkena dampak akibat putusan ini diperkirakan antara 300.000-400.000 orang.⁸

Tabel 1.2
Matrik Ijin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013

NO	PROPINSI	Perusahaan Yang Mengajukan Penangguhan	Jumlah TK Yang Diajukan Penangguhan	KEPUTUSAN		KETERANGAN
				DISETUJUI	DITOLAK	
1	PAPUA BARAT	1	1.225	1	-	SK Gub
2	JAWA TIMUR	96	22.120	24	11	- 56 tidak dapat Di proses karena tidak menyertai kelengkapan -5 mencabut permohonan
3	JAWA TENGAH	25	17.898	2	21	- Ditolak karena tidak melengkapi persyaratan - 2 : mencabut permohonan krn menyatakan sanggup membayar UM
4	DKI JAKARTA	345	182.858	- 13 (SK Gubernur) - 7 (Dalam proses utk diijinkan) - 44 (SK Dinas)	- 1 (Dalam proses ditolak) - 20 (SK Dinas)	260: Tidak dapat diproses karena tidak disertai berkas
5	YOGYAKARTA	7	2.871	6	1	Persyaratan tidak lengkap
6	BANTEN	177	144.394	144	33	Ditolak karena tidak melengkapi persyaratan - 6 mencabut permohonan
7	JAWA BARAT	298	234.298	257	26	- 3 tidak dapat diproses karena pengajuan berkas melewati batas waktu
	TOTAL	949	641.270	498	113	338*

Sumber : Dirjen PHI dan Jamsostek

⁷Kebijakan Upah Minimum Indonesia (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed.../wcms_210427.pdf)

⁸Ibid.,

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Sebanyak 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan sepanjang Februari-Agustus 2013. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan, penyebab utama dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut disebabkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh pelosok Indonesia.⁹ Sependapat dengan Suryamin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alishjabana mengatakan, bertambahnya pengangguran adalah karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tinggi tahun ini.¹⁰ Kondisi tersebut menjadi tekanan pada industri, sehingga memaksa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Armida Alishjabana

Tekanan industri padat pekerja ditambah kenaikan UMP yang relatif tinggi antara tahun 2012-2013 menyebabkan sebagian besar perusahaan memilih mengurangi karyawan dan mengganti sistem produksi dengan otomisasi.” Kenaikan UMP menurut Armida jauh di atas inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2012. Rata-rata UMP per daerah naik 43% tahun ini. "Jadi sangat tinggi dibandingkan dengan inflasi dan KHL yang merupakan indikator."

Upah nominal rata-rata tertinggi bagi pekerja terdapat di sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor keuangan dan perbankan, serta upah terendah terdapat di sektor pertanian.¹¹ Upah minimum nominal rata-rata sederhana untuk Indonesia diperkirakan sebesar Rp 1.288.242 pada tahun 2013, meningkat 14,87 persen dari tahun 2012. Namun, tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2013 telah dikaitkan dengan kerugian nyata untuk pertumbuhan upah

⁹<http://bisnis.liputan6.com/read/739003/32-juta-orang-jadi-pengangguran-gara-gara-upah-naik#sthash.Z5jV1Djf.dpuf>

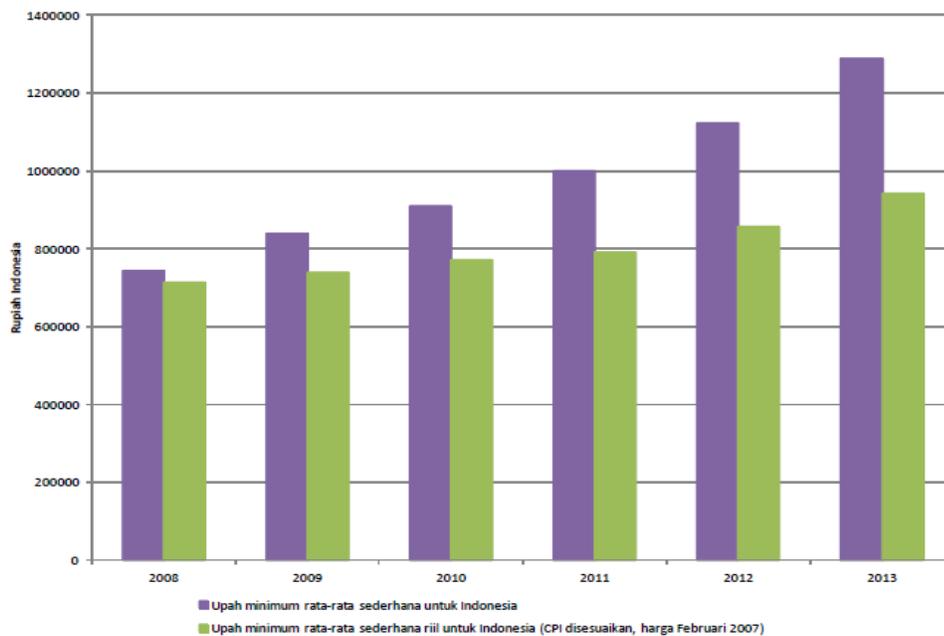
¹⁰<http://finance.detik.com/read/2013/11/07/162508/2406507/4/jumlah-pengangguran-naik-pemerintah-sebut-karena-ump-tinggi>

¹¹ILO

minimum. Analisis tingkat pertumbuhan upah minimum menunjukkan bahwa meskipun upah minimum telah meningkat secara substansial secara nominal, inflasi telah mengikis sebagian keuntungan tersebut.

Gambar 1.2

Tingkat Pertumbuhan Upah Nominal dan Upah Riil Tahun 2008-2013



Sumber : BPS, data diolah

Terjadi peningkatan yang signifikan dalam upah minimum di akhir tahun 2012 di beberapa provinsi terpilih di seluruh Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap stabilitas harga tetap untuk melakukan bisnis di Indonesia dan menyebabkan beberapa investor mempertimbangkan relokasi perusahaan dan pilihan melepaskan pekerjaan. Pengusaha telah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum lebih besar dari peningkatan produktivitas, dan ini dapat berakibat pada penurunan daya saing dan berdampak pada kelangsungan bisnis.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja dengan kata lain akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.¹² Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan akan berpengaruh pada peningkatan biaya *output* yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Faktor lain yang menimbulkan pengangguran, antara lain : adanya rakyat yang menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, ketidaksesuaian diantara keterampilan yang diperlukan dalam industri, serta adanya hambatan bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia.¹³ Selain itu faktor alamiah juga ikut berperan atas timbulnya pengangguran yaitu : laju pertumbuhan penduduk dan pengaruh musim.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Permintaan agregat yang rendah menimbulkan masalah pengangguran
2. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan permasalahan yang akan menghambat pembangunan sehingga menimbulkan pengangguran

¹² Kaufman, Bruce E and Julie L Hotchkiss, The Economic Labor Markets. USA: Georgia State University, 1999, p.323

¹³Sadono Sukirno., Ooc.cit., p. 13

3. Kecenderungan berinvestasi ke dalam barang dan portofolio akan mengurangi penyerapan tenaga kerja
4. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanaman modal untuk mengembangkan sektor-sektor produktif
5. Peningkatan dalam mengkonsumsi barang-barang impor akan menimbulkan lebih banyak pengangguran
6. Peningkatan upah minimum dapat menimbulkan masalah pengangguran
7. Faktor alamiah pertumbuhan penduduk dan musim akan menimbulkan masalah pengangguran
8. Penggunaan peralatan produksi modern akan mengurangi penggunaan tenaga kerja
9. Ketidak sesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri akan menimbulkan pengangguran
10. Adanya hambatan informasi antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang ditawarkan akan menimbulkan pengangguran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan, ternyata masalah pengangguran menyangkut aspek, dimensi, dan faktor-faktor permasalahan yang luas, serta sifatnya yang kompleks. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang

diteliti hanya pada masalah “Pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.”

D. Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat inflasi terhadap pengangguran di Indonesia
2. Apakah terdapat pengaruh antara upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia
3. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat inflasi, dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru, menambah wawasan berpikir serta peningkatan intelektualitas baik bagi peneliti pribadi maupun bagi pembaca sekalian terutama tentang pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.